



# LAKIP

**TAHUN  
2019**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

Jalan Alun - Alun No. 2 Telp./Fax (0265) 2641721  
PARIGI

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 dapat terselesaikan. LAKIP adalah bentuk pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Program dan kegiatan tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, Sekretariat Daerah berkolaborasi dengan beberapa pihak. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai bahan perbaikan kerja di masa yang akan datang.

Pangandaran, 28 Februari 2020  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. KUSDIANA, MM**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19670423 198603 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang memberikan gambaran konkrit tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dan perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan kinerja sesuai Rencana Strategis dilengkapi data pengukuran indikator kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran. Analisis kinerja yang digunakan yaitu analisis kinerja dari tiap sasaran strategis yang bermaksud untuk mengetahui kinerja program dan kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis baik parsial maupun komprehensif yang dihitung menggunakan rerata dari kumulasi persentase capaian semua sasaran strategisnya. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif yang didukung oleh ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2019, serta indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact). Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2019 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 99.31%, berkategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Rencana

Kerja 9 Bagian lingkup Sekretariat Daerah, didukung 16 program serta 97 kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 maka kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup tata kelola perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan dan program, kompetensi dan sinergi sumber daya aparatur serta pengalokasian anggaran secara baik dan tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan .....	1
C. Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat Daerah .....	14
D. Sumberdaya Manusia Sekretariat Daerah.....	15
E. Aspek Strategis .....	17
F. Permasalahan Utama dan Isu Strategis .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	20
B. Indikator Kinerja Utama .....	22
C. Perjanjian Kinerja .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	26
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	37
D. Prestasi Kinerja .....	49
E. Realisasi Anggaran .....	49
BAB IV PENUTUP .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	15
Tabel 1.2	:	Data Pegawai Sekretariat Daerah .....	16
Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.....	20
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah .....	23
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah .....	24
Tabel 3 .1	:	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 3 .2	:	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis .....	29
Tabel 3 .3	:	Nilai Hasil Evaluasi.....	30
Tabel 3 .4	:	Target dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Akuntabilitas.....	31
Tabel 3 .5	:	Target dan Capaian Indeks Nilai (n-1) LPPD .....	33
Tabel 3 .6	:	Peringkat LPPD Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat.....	33
Tabel 3 .7	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018.....	37
Tabel 3 .8	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	42
Tabel 3 .9	:	Capaian Prestasi .....	49
Tabel 3 .10	:	Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2018.....	49
Tabel 3 .11	:	Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2019.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Bagan Struktur Organisasi .....	14
------------	---	---------------------------------	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	16
Grafik 1.2	: Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan.....	17



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

#### **B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan peraturan tersebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas, Badan dan Lembaga Lain, Lembaga Lain sebagaimana

dimaksud yang termasuk Lembaga Lain, Satuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. pembinaan aparatur pemerintah daerah;
- f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah; dan
- g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) Asisten yaitu:

**1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

**2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

**3. Asisten Administrasi Umum.**

Asisten Administrasi Umum membawahkan:

- a. Bagian Umum

b. Bagian Organisasi; dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

### **1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat DPRD serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan Urusan Penanggulangan Bencana serta koordinasi kerukunan umat beragama..

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah di bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Pertanahan dan Perbatasan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan, Evaluasi dan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Bagian Sosial dan Budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup Administrasi bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Pertanahan dan Perbatasan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan,

Evaluasi dan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Bagian Sosial dan Budaya; dan

- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### **1.a. Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pelayanan staf dalam rangka perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pertanahan Perustakaan, kearsipan.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup Administrasi Pemerintahan Umum, yang meliputi pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah, dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup administrasi pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah, dan kerjasama;

- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Bagian Pemerintahan Umum; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Pemerintahan.

#### **1.b. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta mengkoordinasikan dengan sekretariat DPRD

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup hukum dan hak asasi manusia yang meliputi perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup hukum dan hak asasi manusia yang meliputi perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hokum dan hak asasi manusia; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Hukum.

### **1.c. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Sosial dan Budaya serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Sosial, dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Sub Bagian Bina Mental dan Rohani serta Sub Bagian Sosial dan Budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Sub Bagian Bina Mental dan Rohani serta Sub Bagian Sosial dan Budaya;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Sub Bagian Bina Mental dan Rohani serta Sub Bagian Sosial dan Budaya; dan

- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.

## **2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, perindustrian, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta keuangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup perekonomian, pengendalian pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup perekonomian, pengendalian pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan

kebijakan umum lingkup perekonomian, pengendalian pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa.

### **2.a. Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Kelautan Dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha;
- c. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha; dan



- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian. Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat Daerah.

## **2.b. Bagian Pengendalian Pembangunan**

Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup Pengendalian Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Analisis Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Bagian Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, serta koordinasi dan fasilitasi pembangunan aspek pengendalian pembangunan daerah, aspek monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, dan aspek analisis data dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten bidang pengendalian pembangunan;
- c. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta analisis data dan pelaporan pembangunan daerah; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan internal Bagian Pengendalian Pembangunan.

### **2.c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya; dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

### **3. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi.

### **3.a. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dan pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas Bagian Umum yang meliputi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas Bagian Umum yang meliputi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan;

- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan lingkup sekretariat daerah sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Umum.

### **3.b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan mempunyai tugas perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi, pengelolaan acara protokoler, melaksanakan penyiapan dan penyusunan kegiatan Dinas Bupati, serta menyelenggarakan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan Informasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan Informasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan Informasi lingkup sekretariat daerah sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan keprotokolan.

### **3.c. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan Kelembagaan dan Analisis

Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik.

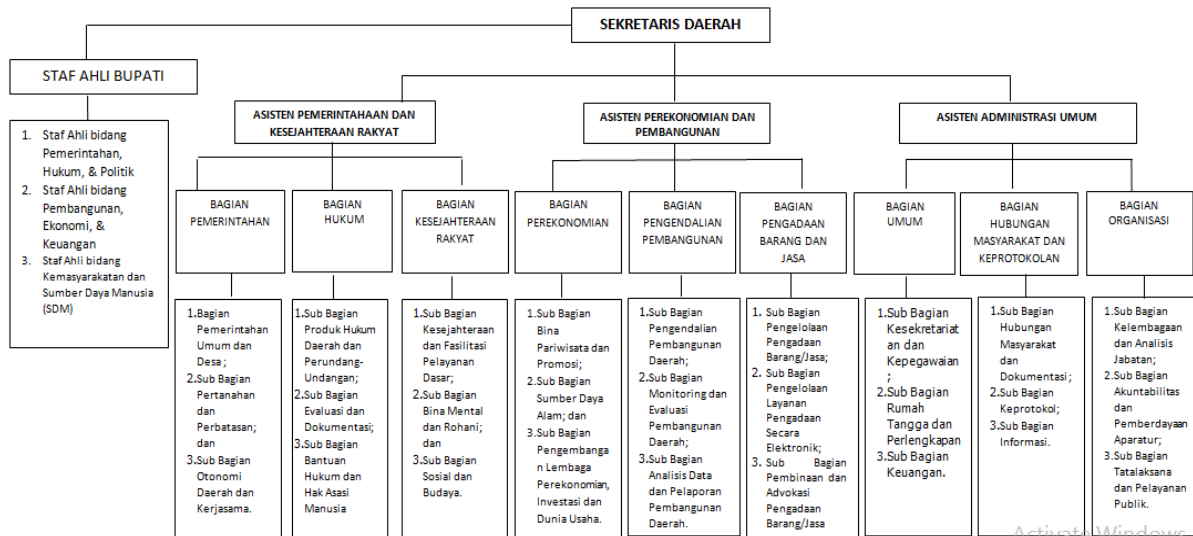
Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Organisasi.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran**



### C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Sekretariat Daerah sebagai institusi yang memberikan supporting kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horisontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi tersebut namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilaksanakan juga koordinasi lintas lingkup. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi prmembantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan yaitu:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Sumberdaya Manusia Sekretariat Daerah**

Keadaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 88 orang. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 18 orang (20,45%), pegawai dengan pendidikan S1 berjumlah 33 orang (37,50%), pegawai berpendidikan Sarjana Muda dan Diploma III berjumlah 9 orang (10,23%), pegawai berpendidikan Diploma II berjumlah 1 orang (1,14%), pegawai dengan pendidikan SLTA/SMA berjumlah 23 orang (26,14%), dan pegawai dengan pendidikan SLTP/SMP tidak ada (0,00%), serta pegawai berpendidikan SD tidak ada (0,00%).

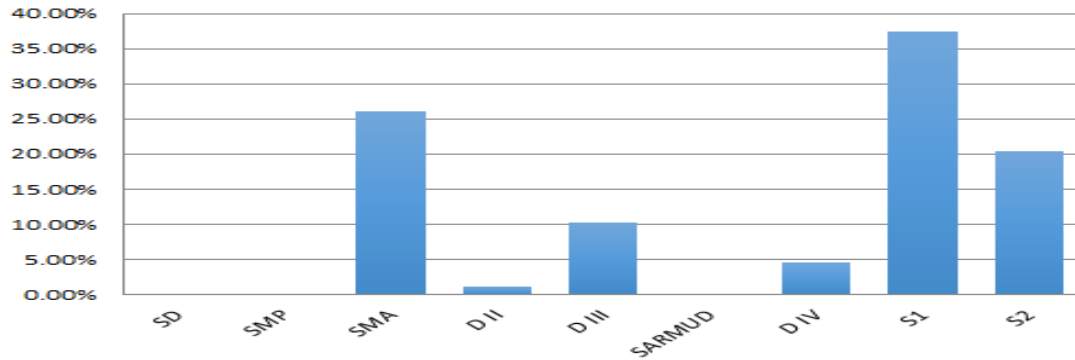
Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 1.1 dan grafik 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

No	Instansi	SD	SMP	SMA	D II	D III	SARMUD	D IV	S1	S2	JML	%
1	Sekretaris Daerah									1	1	1.14
2	Asisten Sekda								1	2	3	3.41
3	Staf Ahli								1	2	3	3.41
4	Bag. Pemerintahan							2	2	2	6	6.82
5	Bag. Kesejahteraan Rakyat			5		1			3	1	10	11.36
6	Bag. Hukum					1			2	2	5	5.68
7	Bag. Perekonomian			2		2			2	2	8	9.09
8	Bag. Pengendalian Pembangunan			2					2	2	6	6.82
9	Bag. Barang dan Jasa			2		1			6		9	10.23
10	Bag. Organisasi			3				1	5	1	10	11.36
11	Bag. Umum			8	1	2			7	1	19	21.59
12	Bag. Humas dan Protokol			1		2		1	2	2	8	9.09
	Jumlah	0	0	23	1	9	0	4	33	18	88	100
	%	0.00%	0.00%	26.14%	1.14%	10.23%	0.00%	4.55%	37.50%	20.45%		100

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

**Grafik 1.1**  
**Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**



Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran golongan dan ruang dapat dilihat pada table 1.2 dan grafik 1.2 berikut :

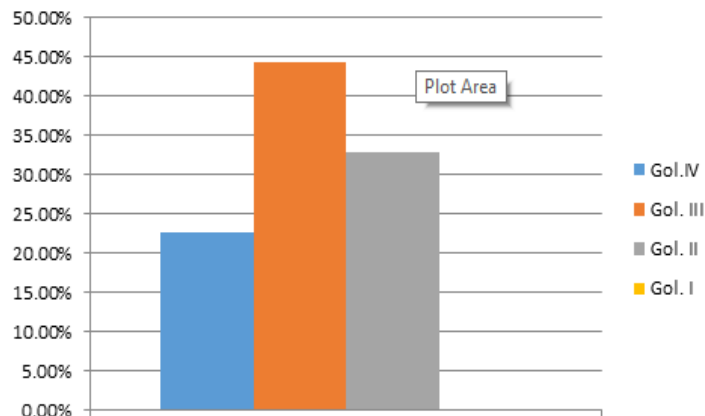
**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan**

No	Instansi	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	JML	%
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	0	1	1.14
2	Asisten Sekda	3	0	0	0	3	3.41
3	Staf Ahli	3	0	0	0	3	3.41
4	Bag. Pemerintahan	2	4	0	0	6	6.82
5	Bag. Kesejahteraan Rakyat	1	3	5	0	9	10.23
6	Bag. Hukum	1	3	1	0	5	5.68
7	Bag. Perekonomian	1	3	4	0	8	9.09
8	Bag. Pengendalian Pembangunan	2	2	2	0	6	6.82
9	Bag. Barang dan Jasa	1	6	2	0	9	10.23
10	Bag. Organisasi	2	7	1	0	10	11.36
11	Bag. Umum	2	7	11	0	20	22.73
12	Bag. Humas dan Protokol	1	4	3	0	8	9.09
Jumlah		20	39	29	0	88	100
%		22.73%	44.32%	32.95%			100

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



**Grafik 1.2**  
**Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan**



### **E. Aspek Strategis**

Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Pangandaran yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

Sekretariat Daerah sebagai institusi yang memberikan supporting kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakanpemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horisontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas juga dilaksanakan koordinasi lintas Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah menghadapi tantangan antara lain:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat secara umum.
2. Permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
3. Kebijakan dan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah yang terpadu.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang terbatas dibandingkan kebutuhan pelayanan yang prima kepada para pemangku kepentingan.
2. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

#### **F. Permasalahan Utama dan Isu Strategis**

Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang baik harus diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur pemerintahan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
2. Belum Optimal pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
3. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan

standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;

4. Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan;
5. Masih ditemukannya pegawai yang melanggar disiplin;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor;

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, yang selanjutnya hasil dari penilaian kinerja tersebut disusun dalam suatu dokumen yang akan membentuk LkJP. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian perangkat daerah terdiri dari dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja yang di dalamnya tersebut juga IKU.

### A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
MISI PERTAMA : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani									
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	60	70	80	90	100
2	Mewujudkan Kebijakan Umum Tata Batas Wilayah	Indeks Kebijakan Tata Batas Wilayah	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	80	85	90	95	100%
3	Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	Persentase kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang diterbitkan	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	50	40	35	30	30

4	Terciptanya Koordinasi kualitas penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sesuai dengan Rencana	Meningkatnya koordinasi ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan	Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas 90%	0	70	80	90	95
5	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Persentase kegiatan keagamaan guna mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Keefektifitas dan efisiensinya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Meningkatkan penggunaan e-procurement terhadap belanja daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	90	90	95	95	95
7	Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dan potensi daerah	Indeks Kebijakan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Penataan Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan Umum Mengenai Pengembangan Potensi Daerah	100	100	100	100	100
8	Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Persentase Keefektifitas dan efisiensinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah Kebutuhan Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dari sekian banyak indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan, ada beberapa indikator yang merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan jabatan yang ada. IKU ini adalah indikator penilaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran telah mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD;
2. Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah;
3. Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB;
4. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi;
5. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET TAHUN 2019
1	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibagi dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran x 100%	BAIK
2	Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB
3	Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB	Nilai LPPD merupakan merupakan hasil evaluasi Menpan RB	SANGAT TINGGI
4	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	Jumlah Rancangan Produk Hukum	35
5	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah pagu pengadaan melalui SPSE dibagi Jumlah pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia x 100%	95

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerimaan amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahunan sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2018 :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019**

NO.	SASARAN	INDICATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Persentase PelaksanaanTupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	80%
2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	BB
3	Meningkatnya Kineja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB	Tinggi
4	Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan PDH	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan KDH yang telah di Evaluasi	15 Dokumen
5	Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH	Persentase fasilitasi KDH/WKDH	100%
6	Terjalannya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama yang disetujui	100%
7	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	95%
8	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Persentase Ranangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	30 Buah



9	Tedaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah OPD yang Telah Mengikuti Pembinaan Hukum	Seluruh OPD
10	Meningkatnya disiplin penyerapan realisasi anggaran	Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas 90%	80%
11	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan	100%
12	Terlaksananya Penataan Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah	Persentase penataan Kualitas kebijakan bidang perekonomian dan Potensi Daerah	100%
13	Meningkatkan penggunaan e-procurement terhadap belanja daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	95%

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
7. Program Ran Ham
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
14. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
15. Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
16. Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. >95% s.d. 100% : Sangat Berhasil
- b. >80% s.d. 95% : Berhasil
- c. >50% s.d. 80% : Cukup Berhasil
- d. < 50% : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar

100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

### B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI 2018	TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	PREDIKAT	BAIK	(76,61) BAIK	(81,18) BAIK	109.97%
2	Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	PREDIKAT	BB	BB		
3	Indeks Nilai (n-1) LPPD	PREDIKAT	SANGAT TINGGI 3,3529	SANGAT TINGGI 3,4070		
4	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	BUAH	67	33	55	166,67
5	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	PERSEN		90	95	104,61

## 1. Capaian Survei Kepuasan Masyarakat

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM “Baik” dari target “Baik” diukur berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 76,61 dengan menggunakan pedoman survey Permen Pan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 81 Perangkat Daerah atau 100% yang memperoleh capaian IKM diatas 76,61, pada Tahun 2019 terdapat 78 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau 96,30% memperoleh nilai IKM lebih dari 76,61, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 96,30%. Capaian kinerja tersebut turun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 113% dari 58 unit Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei terdapat 13 Perangkat Daerah, kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencapai Nilai “Baik” atau di atas 76,61, tetapi untuk tahun 2019 secara riil jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IKM diatas 76,61 bertambah signifikan sebanyak 78 Perangkat Daerah atau meningkat dari 58 Perangkat Daerah pada tahun 2018 menjadi 81 Perangkat Daerah pada tahun 2019. Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei naik dari 58 pada tahun 2018 menjadi 81 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap 81 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan diperoleh sebagaimana pada tabel di atas dari hasil konversi nilai IKM diperoleh poin 81,18 atau dengan predikat “Baik”.

Dari data di atas diperoleh menggunakan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$$

$$\text{IKM} = \frac{6575,31}{81}$$

$$\text{IKM} = 81,18$$

Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	(76,61) Baik	(81,18) Baik	109.97%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			81,18		

*Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran*

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan public seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari matteri pemeriksaan oleh aparaturnya pengawasan internal
- d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## 2. Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah

Nilai AKIP untuk tahun 2019 yang salah satu bahan penilaian LAKIP 2018 sementara belum ada hasil evaluasi dari Inspektorat, sedangkan untuk tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran menargetkan capaian nilai AKIP dapat mencapai nilai BB atau pada kisaran 70-80.Nilai Perolehan dicapai melalui formula :

Realisasi dibagi target capaian dikali 100, dimana targetnya BB (minimal 70) dan raelisasinya untuk tahun 2019 menunggu hasil evaluasi dari Kemenpan-RB, Realisasi score perolehan nilai AKIP 2018 di bagi Target score capaian tahun 2019 di kali 100 persen.

Perhitungan score perolehan nilai AKIP menggunakan Nilai Interval dari evaluasi LAKIP sebagai berikut :

- a. AA (sangat memuaskan) dengan skor 90-100
- b. A (memuaskan) dengan skor 80-90.
- c. BB (Cukup memuaskan) dengan skor 70-80.
- d. B (Baik) dengan skor 60-70.
- e. CC (Cukup Baik) dengan skor 50-60.
- f. C (Cukup Kurang) dengan skor 30-50
- g. D (kurang) dengan skor 0-30.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran yang semula mendapat Nilai CC (nilai Rata-rata awal sebesar 59,94%) menjadi BB (72,27%), Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah). Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan capaian yang diperoleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebesar 87,57% dengan interpretasi **“Memuaskan”** (dilihat dari KKE-Kertas Kerja Evaluasi). Nilai tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2018 sebagaimana pada table berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Nilai Hasil Evaluasi**

No.	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	NilaiEvaluasi (%)
1	Perencanaan Kinerja	15	13,97
2	Pengukuran Kinerja	12,5	10,00
3	Pelaporan Kinerja	7,5	6,68
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>30,65</b>
<b>Interpretasi Hasil Evaluasi</b>		<b>87,57 % (Memuaskan)</b>	

Selanjutnya sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan target capaian AKIP tahun 2019 yaitu dengan :

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya.
- c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
- d. Melalui Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2018 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021;
- e. Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan sampai dengan Laporan Kegiatan sudah terintegrasi melalui Aplikasi Kabupaten;
- f. Ranwal Desa sudah memakai Aplikasi dan terintergritas ke Aplikasi Kabupaten;
- g. Peningkatan SAKIP melalui Aplikasi Kabupaten;
- h. Publikasi WebSite Dokumen Kabupaten;
- i. PK Esselon 3-4.

Capaian kinerja kebijakan “Reformasi Birokrasi” melalui strategi Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian kinerja “Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2019 sebagai tahun ke tiga RPJM Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Akuntabilitas**  
**Tahun 2018 Dan Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realiasasi	%	Target	Realiasis	%
Nilai Evaluasi Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	predikat	CC	BB	122	BB		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

### 3. Indeks Nilai (n-1) LPPD

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tetang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta rekomendasi masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 menjadi “Tinggi”.
2. Menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 menjadi “Sangat Tinggi”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.4/3545/SJ tanggal 8 Mei 2019 tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 menerangkan bahwa prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Skor 0 s.d 1 adalah sebutan untuk prestasi Renda (R).
- b. Skor 1,0001 s.d 2 adalah sebutan untuk prestasi Sedang (S).
- c. Skor 2,0001 s.d 3 adalah sebutan untuk prestasi Tinggi (T).
- d. Skor 3,0001 s.d 4 adalah sebutan untuk prestasi Sangat Tinggi (ST).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dapat disampaikan bahwa Kabupaten Pangandaran mendapatkan realisasi status “Sangat Tinggi”, namun untuk realisasi status Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat disampaikan.

Perlu kami sampaikan bahwa peringkat LPPD Kabupaten Pangandaran berada di posisi ke-17 di antara 27 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat dan kami tidak mendapat hambatan apapun sehingga upaya yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dari seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pangandaran



dan mengolahnya menjadi satu kesatuan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Tabel. 3.5**  
**Target dan Capaian Indeks Nilai (n-1) LPPD Kabupaten Pangandaran**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Tahun 2018				Tahun 2019			
Target		Realisasi		Target		Realisasi	
Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status
Tinggi	Tinggi	3,3529	Sangat Tinggi	3,4070	Sangat Tinggi	-	-

*Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran*

Bahwa peringkat LPPD Kabupaten Pangandaran berada di posisi ke-17 di antara 27 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat dan kami tidak mendapat hambatan apapun sehingga upaya yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dari seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pangandaran dan mengolahnya menjadi satu kesatuan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.6**  
**Peringkat LPPD Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat**

Peringkat	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	3,5121	ST
2	Kabupaten Garut	Jawa Barat	3,4863	ST
3	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	3,4714	ST
4	Kota Cimahi	Jawa Barat	3,4624	ST
5	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	3,4398	ST
6	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	3,4303	ST
7	Kota Banjar	Jawa Barat	3,4195	ST
8	Kota Depok	Jawa Barat	3,4149	ST
9	Kota Bandung	Jawa Barat	3,4144	ST
10	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	3,4070	ST
11	Kota Bogor	Jawa Barat	3,3965	ST

12	Kota Sukabumi	Jawa Barat	3,3768	ST
13	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	3,3767	ST
14	Kabupaten Subang	Jawa Barat	3,3763	ST
15	Kota Bekasi	Jawa Barat	3,3709	ST
16	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	3,3680	ST
<b>17</b>	<b>Kabupaten Pangandaran</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>3,3529</b>	<b>ST</b>
18	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	3,3372	ST
19	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	3,3276	ST
20	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	3,3254	ST
21	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	3,3135	ST
22	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	3,2965	ST
23	Kota Cirebon	Jawa Barat	3,2918	ST
24	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	3,2840	ST
25	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	3,2618	ST
26	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	3,2460	ST
27	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	3,2455	ST

#### 4. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi

Sebagaimana tugas pada Bagian Hukum menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta mengkoordinasikan dengan sekretariat DPRD.

Pada tahun produk hukum yang diharmonisasi serta dilegislati berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diusulkan dari Perangkat Daerah teknis terealisasi sebanyak 55 buah dari target 33 buah atau capaian kinerjanya mencapai 166,67%.

#### 5. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan nilai realisasi capaian diperoleh dari:

$$\frac{\text{Jumlah Pagu Pengadaan Melalui SPSE}}{\text{Jumlah Pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia}} \times 100\%$$

Realisasi Pagu Anggaran Pengadaan =

$$\frac{\text{Rp. 327.832.121.386,91}}{\text{Rp. 348.180.379.797,00}} \times 100\%$$

= 94,15%

Jumlah Pagu Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2019 sebanyak Rp 327.832.121.386,91 dan terealisasi sebanyak 348.180.379.797,00 dikalikan 100 persen sama dengan 94,15% persen. Pencapaian tersebut dari target 90% realisasinya melebihi target capaian kinerana adalah sebesar 104,61%, ketercapaian kinerja melebihi target dikarenakan Bagian Pendagaan Barang dan Jasa melakukan upaya-upaya dalam mencapai taget kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan sosialisasi penggunaan SPSE kepada stakeholders termasuk seluruh SKPD Sumber/dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 2412-Barjas/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Hal: Percepatan Input SiRUP APBD Perubahan 2019;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 1955 -Barjas/2019 Tanggal 130 Agustus 2019 Hal: Pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 1715-Barjas/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 Hal: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 425 -Barjas/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Hal: Diskusi Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Adanya aturan dari pusat tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui metode.

Untuk Lelang dan e-Purchasing melalui SPSE (e-Procurement) Sumber aturan yang disosialisasikan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paket pekerjaan Tender yang diusulkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah sejumlah 147 paket, di antaranya Pengadaan Barang sejumlah 22 paket, Pengadaan Konstruksi sejumlah 118 paket, Pengadaan Konsultansi sejumlah 7 paket, dan Pengadaan Jasa Lainnya sejumlah 0 paket.

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yaitu :

$$\frac{147}{147} \times 100\% \\ = 100\%$$

Pada tahun 2019 capaian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik terealisasi sebanyak 100% dari target 95 % atau capaian kinerjanya mencapai 105,26%.

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik nilai realisasi capaian diperoleh dari:

$$\frac{\text{Jumlah Paket Pengadaan Melalui SPSE}}{\text{Jumlah Paket pekerjaan Tender yang diusulkan}} \times 100\%$$

### C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Setda.

Atas dasar telah ditetapkan indikator tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis sekretariat daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup sekretariat daerah. Hasil pengukuran atas capaian sasaran strategis sekretariat daerah tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	SKJ	100	100	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Perda Penataan Kelembagaan OPD	Perda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Penerapan SPM	Urusan	6	6	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PS LP2P	Dokumen	5	5	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan	OPD	23	23	100	Sangat Berhasil

2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Dokumen LAKIP yang Baik	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Kebijakan Program KDH / Kegiatan SKPD	Dokumen	5	3	60	Cukup Berhasil
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	%	100	95	95	Sangat Berhasil
		Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik	%	100	95	95	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD	Dokumen	3	3	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN	Kecamatan	6	6	100	Sangat Berhasil
5	Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah lembaga yang Layak mendapatkan Hibah	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten	Kecamatan	10	1	10	Kurang Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pelayanan	Kegiatan	20	20	100	Sangat

		Kegiatan Keagamaan					Berhasil
		Jumlah Calon Jemaah Haji	Orang	450	386	85.78	Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jenis	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya	Kegiatan	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam	Kegiatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Silaturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran	Lembaga	15	15	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda	Kegiatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL	Kecamatan	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Destinasi Wisata yang	Ow	5	5	100	Sangat Berhasil

		termonitoring dan terevaluasi					
		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha	Kecamatan	10	10	100.00	Sangat Berhasil
6	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	Kasus	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Permasalahan Perbatasan antar Pemerintah Daerah	Kasus	2	2	100	Sangat Berhasil
7	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di Koordinasikan	Kasus	30	26	86.67	Berhasil
		Jumlah Pendampingan Perkara	Kasus	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa	Buku	67	67	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Produk Hukum	63	63	100.00	Sangat Berhasil
		Jumlah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum	63	62	98.41	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website	Produk Hukum	63	63	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Peserta Pembinaan Sadar Hukum	Desa	93	93	100	Sangat Berhasil



8	Terjalannya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Kegiatan	4	4	100	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan	Persen	100	95	95	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
10	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangandaran	Dokumen	15	15	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Dokumen	18	18	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi	Dokumen	105	105	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
11	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM	OPD	34	34	100	Sangat Berhasil

Dari 11 (sebelas) sasaran di atas dengan 52 (lima puluh dua) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampaui target ( $\geq 101\%$ ) sebanyak tidak ada
2. Sesuai dengan target (100%) sebanyak 45 indikator kinerja
3. Belum sesuai target ( $< 100\%$ ) sebanyak 7 indikator kinerja

Hasil pengukuran atas capaian sasaran strategis sekretariat daerah tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	36	36	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Perda/Perkada Penataan Kelembagaan OPD	Perangkat Daerah	36	36	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Standar Operasional Prosedur	Paket Berkas	5	5	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen tentang Pedoman dan Roadmap reformasi Birokrasi di Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran	Perangkat Daerah	36	36	100	Sangat Berhasil

		Jumlah instrumen analisis jabatan ASN	Pegawai	3408	3408	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD	Perangkat Daerah	36	36	100	
2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Dokumen LAKIP yang Baik	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	Dokumen	12	12	100	Cukup Berhasil
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD	Dokumen	3	3	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kepala Desa dan BPD yang Dilantik	Orang	61	61	100	Sangat Berhasil

		Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN	Kecamatan	6	6	100	Sangat Berhasil
5	Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah Fasilitas Operasional KDH/WKDH	Bulan	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH	Kali	375	375	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Keprotokolan	Kali	16	15	93.75	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah	Jenis	5	5	100	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan	Kegiatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Jemaah Haji	Orang	400	400	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Kurang Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Kegiatan	20	19	95	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya	Jenis	4	3	75	Cukup Berhasil

		Jumlah Kegiatan Silaturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran	Kegiatan	15	15	100.00	Berhasil
		Jumlah Kegiatan Keagamaan	Lembaga	16	14	87.5	Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam	Lembaga	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah lembaga yang layak mendapatkan Hibah	Lembaga	150	150	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jenis	4	3	75	Cukup Berhasil
7	Terlaksananya Penataan	Jumlah Destinasi	Objek Wisata	5	5	100	Sangat Berhasil

	Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi daerah	Wisata yang termonitoring dan terevaluasi					
		Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian , BUMD dan LKM	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Pelaku Usaha	45	45	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Dokumen Raperda	Raperda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Dokumen Raperda	Raperda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Dokumen Raperda	Raperda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Dokumen Pendampingan	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
8	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan	Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	Kasus	2	2	100	Sangat Berhasil

	Tata Batas Wilayah						
9	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Buku	30	48	160.00	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website	Produk Hukum	33	55	166.67	Sangat Berhasil
		Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa	Buku	321	321	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Produk Hukum	63	55	87.30	Berhasil
10	Terjalannya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Buah	5	5	100	Sangat Berhasil
11	Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan	Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil

	pembangunan	Anggaran Kabupaten					
		Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
12	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah	Dokumen	147	147	100	Sangat Berhasil
13	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM	Dokumen	5	5	100	Sangat Berhasil

Sumber : Data diolah tahun 2019

Dari 13 (tiga belas) sasaran di atas dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampaui target ( $\geq 101\%$ ) sebanyak 2 indikator
2. Sesuai dengan target (100%) sebanyak 45 indikator kinerja
3. Belum sesuai target ( $< 100\%$ ) sebanyak 6 indikator kinerja



#### D. Prestasi Kinerja

**Tabel 3.9**  
**Capaian Prestasi Linkup Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

NO.	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Penghargaan Tingkat Provinsi (Bagian Perekonomian Setda) Bandung, 10 Desember 2019 Jenis Penghargaan : Terbaik Pertama Pendukung Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2019 Dikeluarkan oleh : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	
2.	Penghargaan Tingkat Nasional (Bagian Hukum Setda) Jakarta, 05 Desember 2019 Jenis Penghargaan : Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2018 Dikeluarkan oleh : Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	

#### E. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2018 melalui 17 program dengan target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja out put kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2018**

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
I	SASARAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD					
1	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	326,691,400	299,893,600	100%	93,78%	Efisiensi
II	SASARAN : Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					

1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	300,509,500	298,117,450	100%	98,92	Efisiensi
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	142,150,000	140,759,400	77,50%	99,11%	Efisiensi
III	<b>SASARAN :Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH</b>					
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2,247,579,900	2,207,491,136	100%	98,26%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2,927,840,000	2,714,777,944	92,56%	91,16%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2,614,874,500	2,453,384,340	100%	88,80%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	68,118,600	68,010,600	100%	99,84	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	178,350,000	172,881,813	78,57	96,91	Efisiensi
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,636,602,071	1,585,198,411	100%	97,90%	Efisiensi
IV	<b>SASARAN :Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah</b>					
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	86,882,400	85,234,739	100%	98,08%	Efisiensi
V	<b>SASARAN : Tersedianya Produk Hukum Daerah</b>					
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	348,357,000	306,772,104	97,87%	82,06%	
VI	<b>SASARAN : Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota</b>					

1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	38,290,529	38,217,874	100%	99,81%	Efisiensi
<b>VII</b>	<b>SASARAN : Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan</b>					
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	210,450,000	207,499,300	98,33%	98,12%	Efisiensi
<b>VIII</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik</b>					
1	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	350,900,000	338,521,467	100%	99,84%	Efisiensi
<b>IX</b>	<b>SASARAN : Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat</b>					
1	Program Ran Ham	50,885,000	50,276,844	100%	98,80%	Efisiensi
<b>X</b>	<b>SASARAN : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</b>					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.389.548.600	3.324.471.039	100%	98,78	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.429.115.000	1.415.860.628	100%	98,31%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	300.509.500	298.117.450	100%	99,18%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	763.660.000	757.414.000	100%	99,18	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.247.579.900	2.207.491.136	100%	98,26%	Efisiensi

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 sebesar Rp 32.815.958.023 (Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan besaran anggaran Rp 12.266.055.923 (Dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 20.549.902.100 (Dua puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus dua ribu delapan seratus rupiah).

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2019 melalui 24 program dengan target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja out put kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
I	SASARAN :Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD					
1	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	252,227,200.00	239,386,336.00	100%	92%	Efisiensi
II	SASARAN :Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,039,777,500.00	1,014,980,977.00	100%	98%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325,621,000.00	309,645,270.00	83%	95%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155,581,100.00	153,568,900.00	100%	99%	Efisiensi
4	Program Peningkata Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	520,000,000.00	511,312,078.00	100%	98%	Efisiensi
III	SASARAN :Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH					
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	15,000,000.00	14,250,000.00	100%	95%	Efisiensi

2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,731,933,500.00	1,438,561,253.00	100%	83%	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	160,892,000.00	154,877,544.00	100%	93%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5,074,347,500.00	4,571,268,593.00	88%	95%	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,347,489,800.00	1,309,424,130.00	98%	94%	Efisiensi
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75,649,000.00	74,208,050.00	100%	98%	Efisiensi
<b>IV</b>	<b>SASARAN : Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah</b>					
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	138,900,000.00	135,838,453.00	100%	98%	Efisiensi
<b>V</b>	<b>SASARAN : Tersedianya Produk Hukum Daerah</b>					
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	267,782,500.00	245,535,200.00	128%	94%	Efisiensi
<b>VI</b>	<b>SASARAN : Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota</b>					
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	33,750,000.00	33,641,219.00	100%	100%	
<b>VII</b>	<b>SASARAN : Meningkatkan ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan</b>					
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	232,990,000.00	231,786,150.00	100%	100%	Efisiensi
<b>VIII</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik</b>					
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	178,500,000.00	177,435,858.00	100%	99%	Efisiensi
2	Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	144,900,000.00	141,750,000.00	100%	95%	Efisiensi
<b>IX</b>	<b>SASARAN : Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat</b>					

1	Program Ran Ham	37,600,000.00	36,984,521.00	100%	98,36%	Efisiensi
X	SASARAN : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,839,696,500.00	5,472,673,671.00	95%	92%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,807,127,500.00	1,633,872,462.00	94%	90%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	241,027,000.00	233,953,000.00	100%	97%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434,110,000	412,856,000	100%	95,10%	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325.621.000	309.645.270	83.33%	78,76%	Efisiensi

#### F. Analisis terhadap Rendahnya Penyerapan Anggaran

Pada tahun Anggaran 2018 terdapat 2 Sasaran yang penyerapan Anggarannya di bawah 90 % yaitu :

1. Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 2,614,874,500.00 terealisasi Sebesar Rp. 2,453,384,340.00, hal tersebut dikarenakan terdapat 2 kegiatan yang penyerapannya dibawah 90% yaitu kegiatan Pembinaan Tim Penataan Ritel Tradisional/PKL hanya terserap Rp. 13,140,551.00 dari anggaran Rp. 16,800,000.00 atau sebesar 78,22% , kegiatan Optimalisasi Peningkatan Usaha Ekonomi Daerah terserap Rp. 37,358,120.00 dari anggaran Rp. 43,270,000.00 atau sebesar 86,34% dan kegiatan Optimalisasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah terserap Rp. 37,777,169.00 dari anggaran Rp. 47,650,000.00 atau sebesar 81,38%. Dari 7 kegiatan yang ada pada Bagian Perekonomian ada 3 kegiatan yang penyerapannya dibawah 90% sehingga penyerapan rata-ratanya ada [ada kiasaran 88,80%. Jenis belanja yang diefisiensi penyerapannya karena adanya Surat Edaran Bupati tentang efisiensi belanja Anggaran tahun 2018 yaitu pada jenis belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Makanan dan Minuman
2. Tersedianya Produk Hukum Daerah pada Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 348,357,000.00 terealisasi Sebesar Rp. 306,772,104.00 atau 88,06%; hal tersebut dikarenakan kegiatan Pembinaan Sadar Hukum hanya terserap Rp. 3,248,000.00 dari anggaran Rp. 21,400,000.00 atau sebesar 15% sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap 93 Desa tidak terlaksana karena

adanya Surat Edaran Bupati tentang efisiensi belanja Anggaran tahun 2018 yaitu pada jenis belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Makanan dan Minuman.

Pada tahun Anggaran 2019 terdapat 2 Sasaran yaitu :

1. Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggaran 1,731,933,500.00 terealisasi terealisasi 1,438,561,253.00 atau sebesar 83,06 %. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa item belanja yang penyerapannya tidak maksimal karena belanja dimaksud sifatnya incidental yaitu pada belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Jasa Service kendaraan ;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  - c. Belanja perjalanan dinas luar negeri;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran Rp. 325,621,000.00 terealisasi terealisasi Rp. 309,645,270.00 atau penyerapan rata-rata sebesar 78,76 %. Hal tersebut dikarenakan dari 6 kegiatan ada 1 kegiatan yang tidak diserap yaitu pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan anggaran Rp. 7,351,000.00 terealisasi Rp. 0.00 atau sebesar 0 %. Untuk Laporan Semesteran menggunakan hasil laporan Bulanan dan Triwulanan untuk Laporan Semesteran tidak dibuat sehingga anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tidak serap.

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), secara umum Sekretariat Daerah Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian atas sasaran-sasaran strategisnya. 13 sasaran sebagaimana tertuang Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 sasaran (100%) tercapai dengan predikat Sangat Berhasil, dengan target (100%) sebanyak 45 indikator kinerja sedangkan indikator kinerja  $\geq 101\%$  sebanyak 2 indikator kinerja, dan yang belum sesuai target ( $<100\%$ ) sebanyak 6 indikator kinerja.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, dan khususnya untuk Penetapan Kinerja Sekretariat dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum



memenuhi target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lagi pada tahun-tahun mendatang.

Pangandaran, 28 Februari 2020  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. KUSDIANA, MM**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19670423 198603 1 002